

**PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN  
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TERHADAP  
KAPASITAS FISKAL DI KABUPATEN PRINGSEWU  
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
TAHUN 2011-2020**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Oleh  
FERLI ADI ATMOKO  
NPM: 1751010191**

**Program Studi : Ekonomi Syari'ah**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1443 H/2022 M**

**PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN  
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TERHADAP  
KAPASITAS FISKAL DI KABUPATEN PRINGSEWU  
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
TAHUN 2011-2020**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**



**Pembimbing I : Vitria Susanti, M.A., M.Ec.Dev**

**Pembimbing II : Dr. Muhammad Iqbal fasa, M.E.I**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1443 H/2022 M**

## ABSTRAK

Sejak adanya sistem desentralisasi, pemerintah daerah dapat mengatur dan mengalokasikan secara mandiri penerimaan daerah dalam pengelolaan kewenangannya. Kemandirian daerah dapat dicerminkan melalui kapasitas fiskal daerah dan di gambarkan dalam peta kapasitas fiskal dalam bentuk indeks (IKF). Kemandirian suatu daerah dapat pengaruhi oleh pendapatan asli daerah karena semakin besar pendapatan suatu daerah akan semakin baik dalam mengelolah rumah tangga daerah dan meningkatkan perekonomian daerah.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Dengan pendekatan deskriptif menggunakan data *time series*. Populasi pada penelitian ini adalah data yang dikumpulkan dari jangka waktu yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan PDRB yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung pada tahun 2011-2020. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu teknik purposive sampling. Sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 10 tahun dari tahun 2011-2020. Sampel yang diambil adalah data Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Produk Domestik Regional Bruto, dan Kapasitas Fiskal. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program komputer Spss Statistics20.

Variabel independen dalam penelitian ini yaitu, pajak daerah, retribusi daerah, dan produk domestik regional bruto sedangkan variabel dependen yaitu kapasitas fiskal. Kesimpulan dalam penelitian menyatakan bahwa secara parsial pajak daerah tidak berpengaruh signifikan dan negative terhadap kapasitas fiskal, retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kapasitas fiskal dan produk domestik regional bruto berpengaruh signifikan terhadap kapasitas fiskal. Sedangkan secara simultan, pajak daerah, retribusi daerah, dan produk domestik regional bruto berpengaruh signifikan terhadap kapasitas fiskal.

**Kata Kunci : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Produk Domestik Regional Bruto, Kapasitas Fiskal.**

## **ABSTRACT**

*Since decentralized system exist, local governments can autonomously regulate and allocate their regional revenues in their management authority. Regional autonomy can be reflected through the regional fiscal capacity and illustrated in fiscal capacity map in the form of an index (FCI). The regional autonomy can be affected by regional original income because the greater the income of a region, the better in managing regional households and improving the regional economy.*

*This study use quantitative approach method. With a descriptive approach using time series data. The population in this study is data collected from a period of time, namely local taxes, regional retribution and GRDP published by the Central Statistics Agency (BPS) Lampung in 2011-2020. The sampling technique in this research is purposive sampling technique. So that the number of samples obtained is 10 years from 2011-2020. The samples taken are data on Regional Taxes, Regional Levies, Gross Regional Domestic Product, and Fiscal Capacity. This study use multiple linear regression analysis method using the computer program Spss Statistics 20.*

*The independent variables in this study are local taxes, regional fees, and gross regional domestic product, while the dependent variable is fiscal capacity. The conclusion in the study states that partially local taxes have no significant and negative effect on fiscal capacity, regional levies have no significant effect on fiscal capacity and gross regional domestic product have a significant effect on fiscal capacity. Meanwhile, simultaneously, local taxes, regional levies, and gross regional domestic product have a significant effect on fiscal capacity.*

***Keywords: Regional Taxes, Regional Levies, Gross Regional Domestic Product, Fiscal Capacity.***



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol.H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721)703260

---

**SURAT PERNYATAAN**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ferli Adi Atmoko  
NPM : 1751010191  
Jurusan : Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kapasitas Fiskal Di Kabupaten Pringsewu Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2011-2020 adalah benar-benar hasil karya pribadi tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain kecuali yang telah dirujuk dan disebut dalam Footnote dan daftar pustaka, yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 4 februari 2021  
Penulis,



**Ferli Adi Atmoko**  
**1751010191**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Alamat: Jl. Letkol.H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721)703260*

---

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TERHADAP KAPASITAS FISKAL DI KABUPATEN PRINGSEWU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TAHUN 2011-2020**

**Nama : Ferli Adi Atmoko  
NPM : 1751010191  
Jurusan : Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

**MENYETUJUI**

Untuk di seminarkan dan dipertahankan dalam sidang seminar  
Munaqosah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan  
Lampung

**Pembimbing I**

**Vitria Susanti. M.A. M, Ec. Dev**  
NIP : 197809182005012005

**Pembimbing II**

**Dr. Muhammad Iqbal fasa, M.E.I**  
NIP : 199009182019031010

**Ketua Jurusan**

**Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy.**  
NIP : 198208082011012009



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Alamat: Jl. Letkol.H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721)703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kapasitas Fiskal Di Kabupaten Pringsewu Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2011-2022”** disusun oleh Ferli Adi Atmoko NPM : 1751010191, Program Studi Ekonomi Syariah, Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : kamis 30 Juni 2022.

**TIM PENGUJI**

<b>Ketua</b>	<b>: Dr. Ahmad Habibi, M.E</b>	(.....)
<b>Sekretaris</b>	<b>: Zathu Restie Utamie, M.Pd</b>	(.....)
<b>Penguji I</b>	<b>: Dr. Erike Anggraini, M.E.Sy</b>	(.....)
<b>Penguji II</b>	<b>: Vitria Susanti, M.A., M.E.c., Dev</b>	(.....)

**Mengetahui,**  
**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Prof. Dr. Sulus Suryanto, S.E.M.M, Akt, C.A**  
**NIP. 197009262008011008**



## MOTTO

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ۗ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ۗ فَالَّذِيْنَ ءَامَنُوْا

مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿٧﴾

*“Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya serta infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari apa yang Dia (titipkan kepadamu dan) telah menjadikanmu berwenang dalam (penggunaan)-nya. Lalu, orang-orang yang beriman di antaramu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang sangat besar”.*

(Q.S. Al-Hadid; 7).



## PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT. atas segala nikmat-Nya, sehingga penulis mampu menyajikan hasil penelitian yang semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan. Dengan lafal bismillah dan rasa syukur serta kerendahan hati, penulis persembahkan hasil penelitian ini kepada :

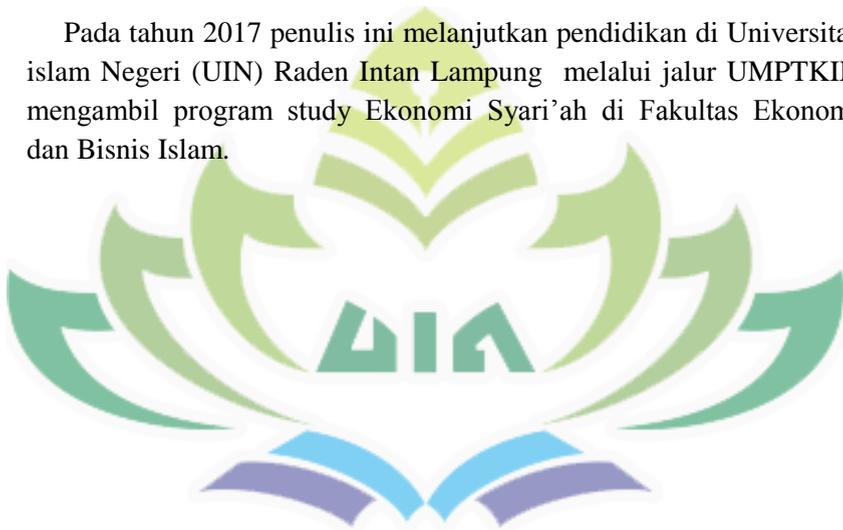
1. Ucapan pertama dan sangat utama saya haturkan kepada kedua orang tua ku Bapak Ngadiman dan Ibu Sarengati yang tiada hentinya mendoakan ku hingga sampai ke tahap ini. Anugerah yang tak terhingga Allah SWT berikan kepadaku kedua orang tua yang selalu mendukung, mendoakan, menyemangati dan selalu mencintaiku, sehingga inilah salah satu motivasi saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih orang tua ku akan kerja keras, keringat dan letih mu dalam mendidik dan membimbingku sehingga diriku mampu menyelesaikan program studi S1 ini. yang luar biasa serta mendoakan saya agar bisa cepat menyelesaikan skripsi ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan keberkahan dalam setiap langkahnya.
2. Ke empat kakak saya Budi Handoko, Ngaida listiana, dan Daryanti yang telah memotivasi dan memberi dukungan kepada saya,
3. Almamaterku tercinta tempat saya menimba ilmu yaitu UIN Raden Intan Lampung. Semoga selalu Berjaya, maju dan berkualitas.
4. Kedua pembimbing saya ibu Vitria Susanti. M.A. M, Ec.Dev dan Bapak Dr. Muhammad Iqbal fasa, M.E.I yang bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing saya, serta selalu memberi motivasi dan dukungan untuk perjalanan hidup saya selanjutnya.
5. Teman-teman seperjuangan Jurusan Ekonomi Syari'ah angkatan 2017 yang telah membantu dan mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Ferli Adi Atmoko, dilahirkan di Sumberagung, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, pada tanggal 25 oktober 1998, Penulis ini merupakan anak ke-4 dari 4 bersaudara dari pasangan Bapak Ngadiman dan ibu Sarengati. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu :

1. SD NEGERI 04 Sumberagung pada tahun 2005-2011
2. SMP NEGERI 01 Ambarawa pada tahun 2011-2014
3. SMA NEGERI 01 Ambarawa pada tahun 2014-2017

Pada tahun 2017 penulis ini melanjutkan pendidikan di Universitas islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung melalui jalur UMPTKIN mengambil program study Ekonomi Syari'ah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



## KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah yang berhak di puji karena nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Tidak ada sedikit perjuangan pun yang luput dari pengawasan-nya, karena dia-lah yang mengatur jiwa-jiwa kita semoga keberkahan senantiasa tercurahkan kepada kita semua. Sholawat dan salam selalu kita sanjungkan kepada sang tauladan sejati, pembawa risalah yaitu Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita semua diberikan syafaatnya dihari kiamat. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program strata satu ( S1) jurusan Ekonomi Syari'ah Fakultas dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Penyelesaian skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa adanya bantuan, kerjasama, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E.M.M, Akt, C.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan izin kepada peneliti pada proses penelitian skripsi.
2. Ibu Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy. selaku ketua jurusan Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
3. Ibu Vitria Susanti M.A. M.Ec.Dev, selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Muhammad Iqbal fasa, M.E.I selaku pembimbing II yang dengan tulus telah meluangkan wktu dalam membimbing. Mengarahkan, mendukung dan memotivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak /Ibu dosen, Karyawan/I Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis menjadi mahasiswa.
5. Seluruh staff karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang turut berperan dalam penyelesaian studi penulis.
6. Keluarga besar Kuliah Kerja Nyata (KKN-DR 2020), Ketua RT Arief dan keluarga besar di Desa Sumberagung Kecamatan Sumberagung Kabupaten Pringsewu, yang memberikan tempat

bagi penulis menyelesaikan KKN dan membantu dalam pendidikan ini.

7. Sahabatku. Budi, fahrudin, imam, habib, topan, gurit, jecki, bram, febrio, tharik, efendi, kelvin, ilham. Serta yang tidak bisa disebutkan satu per-satu dalam lembaran ini, terimakasih karena telah jadi tempat berbagi dalam setiap hal.
8. Partner terbaik Pance *Fams* yang memberikan bantuan, arahan, serta masukan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
9. Rekan terbaik Syarifah Suhaiba Tul'as Lamia Al-madihi yang selalu memberi dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Rekan-rekan satu angkatan 2017 Terkhusus Ekonomi Syari'ah kelas C yang selalu memberikan motivasi guna untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT. selalu memberikan rahmat dan karunianya kepada Orang Tua, Bapak dan Ibu dosen, Sahabat dan seluruh pihak yang terlibat. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini. Hal ini tidak lain karena keterbatasan kemampuan, waktu, dan biaya yang dimiliki. Untuk itu kiranya para pembaca dapat memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun guna melengkapi tulisan ini dan menjadikannya lebih baik lagi.

Bandar Lampung, 4 februari 2021  
Penulis

**Ferli Adi Atmoko**  
**1751010191**

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	v
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Identifikasi dan batasan masalah.....	10
D. Rumusan Masalah .....	11
E. Tujuan Penelitian .....	11
F. Manfaat Penelitian .....	12
G. Kajian Penelitian Terdahulu .....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS</b>	
A. Teori Yang Digunakan.....	23
1. Teori Otonomi Daerah.....	23
2. Kapasitas Fiskal.....	24
3. Pajak Daerah .....	30
a. Definisi Pajak Daerah.....	30
b. Unsur Unsur Pajak Daerah .....	32
c. Fungsi Pajak Daerah.....	32
4. Retribusi Daerah.....	33
a. Definisi Retribusi Daerah .....	33
b. Ciri-ciri Retribusi Daerah .....	34
c. Jenis-jenis Retribusi Daerah .....	35

5. Produk Domestik Regional Bruto.....	6
a. Definisi Produk Domestik Regional Bruto.....	36
b. Peran Konsep Pendekatan Perhitungan dalam PDRB .....	38
c. Jenis-jenis Produk Domestik Regional Bruto.....	39
6. Kerangka Berfikir.....	40
7. Pengajuan Hipotesis .....	41

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian .....	45
1. Jenis Penelitian .....	45
2. Sifat Penelitian.....	45
B. Sumber Data Penelitian .....	46
C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengumpulan Sampel .....	46
D. Teknik Pengumpulan Data.....	48
E. Definisi Operasional.....	49
F. Metode Analisis Data .....	49

### **BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Hasil Penelitian.....	55
B. Analisis Data .....	59
C. Pembahasan Hasil Penelitian .....	66

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	79
B. Keterbatasan Penelitian.....	80
C. Saran .....	80

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Table 1.1	Peta Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2020 .....	5
Tabel 1.2	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2020 .....	6
Tabel 1.3	Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2020 .....	7
Tabel 1.4	PRDB Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2020	
Tabel 1.5	Pokok Perubahan PMK 2016 dan 2017.....	8
Tabel 4.1	Realisasi Pajak Daerah di Kabupaten Pringsewu Tahun 2011-2020.....	51
Tabel 4.2	Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011-2020.....	52
Tabel 4.3	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pringsewu Tahun 2011-2020 .....	53
Tabel 4.4	Kapasitas Fiskal Kabupaten Pringsewu Tahun 2011-2020.....	54
Tabel 4.5	Hasil Uji Normalitas .....	55
Tabel 4.6	Hasil Uji Multikolinieritas .....	56
Tabel 4.7	Hasil Uji Autokoleriasi .....	57
Tabel 4.8	Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	57
Tabel 4.9	Hasil Uji T/ Parsial .....	58
Tabel 4.10	Hasil Uji F/ Simultan .....	60
Tabel 4.11	Hasil Uji Determinas R <sup>2</sup> .....	60
Tabel 4.12	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pringsewu 2011-2020 .....	62
Tabel 4.13	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pringsewu 2011-2020 .....	64

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Berfikir .....	38
------------------------------------	----



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Tabulasi Data Variabel Penelitian
- Lampiran 2. Hasil Uji Normalitas
- Lampiran 3 Hasil Uji Multikolinearitas
- Lampiran 4. Hasil Uji Autokerolasi
- Lampiran 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas
- Lampiran 6. Hasil Uji T (Parsial)
- Lampiran 7. Hasil Uji F (Simultan)
- Lampiran 8. Hasil Uji Determinasi ( $R^2$ )



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal agar dapat memahami dengan jelas dan memudahkan dalam mendapatkan gambaran proposal ini, maka penulis menyampaikan beberapa istilah yang terkait dalam penulisan proposal ini. Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah dalam judul tersebut, adapun istilah-istilah yang digunakan sebagai berikut :

1. **Pengaruh** adalah keadaan hubungan timbal balik, atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang di pengaruhi. Dua hal ini adalah yang akan dihubungkan dan dicari apa ada hal yang menghubungkannya.<sup>1</sup>
2. **Pajak daerah** adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>2</sup>
3. **Retribusi Daerah** adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan dan /atau di berikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.<sup>3</sup>
4. **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)** merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu Negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu. Produk

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Gramdia. 2007), h.78.

<sup>2</sup> Trisni suryarini, Tarsis Tarmudji, *Pajak di Indonesia* (Yogyakarta:Graha Ilmu,2012). h.75.

<sup>3</sup> Trisni suryarini, Tarsis Tarmudji, *Pajak di Indonesia* (Yogyakarta:Graha Ilmu,2012). h.7.

Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan ukuran prestasi (keberhasilan) ekonomi dari seluruh kegiatan ekonomi.<sup>4</sup>

5. **Kapasitas Fiskal** adalah kemampuan keuangan masing masing daerah yang di cerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.<sup>5</sup>
6. **Prepektif** berasal dari bahasa Itali “Prospetivva” yang berarti gambaran atau pandangan. Perspektif dapat dikatan suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu digunakan dalam melihat suatu fenomena.<sup>6</sup>
7. **Ekonomi Islam** adalah tata aturan yang berkaitan dengan cara memproduksi, distribusi, dan konsumsi serta kegiatan lain dalam rancari ma”isyah (penghidupan individu maupun kelompok atau negara) sesuai dengan ajaran Islam (Al-Qur”an dan Al-Hadis).<sup>7</sup>

Bedasarkan penjelasan istilah diatas, maka pembahas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan produk domestik regional bruto terhadap kapasitas fiskal. Adapun judul dalam Skripsi ini adalah “**Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Kapasitas Fiskal Di Kabupaten Pringsewu Dalam Perspektif Islam Tahun 2011-2020**”.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan salah satu negara yang di kategorikan dalam negara berkembang, dimana Negara tersebut sedang melakukan usaha-usaha pembangunan yang giat dilaksanakan oleh negara-negara sedang berkembang (*Developing Countries*) di dunia pada umumnya berorientasi kepada bagaimana memperbaiki atau mengangkat tingkat

---

<sup>4</sup> Philip Kotler, A.B. Susanto, *Managemen Pemasaran Di Indonesia* ( Jakarta : selemba empat, 2001).h. 602-603.

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Keuangan, Nomor 120/PMK.07/2022

<sup>6</sup> Elvinaro Ardianto, Bambang Q-Aness, *Filsafat Ilmu Komunikasi* (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2009), h. 50.

<sup>7</sup> Aziz Abdu, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2008), h.3

hidup (*Level Of Living*) masyarakat di negara negara maju (*Developed Countries*).<sup>8</sup> Salah satu usaha yang sedang dilaksanakan Indonesia dalam pembangunan adalah melaksanakan otonomi daerah, atau proses peralihan dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi yang disebut pemerintah daerah dengan otonomi.<sup>9</sup>

Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan.<sup>10</sup> Otonomi daerah mempunyai sasaran dan tujuan pembangunan selain mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar pemerataan hasil-hasil pembangunan yang adil dapat dirasakan oleh masyarakat, dan ini dapat mudah dicapai dengan memperhatikan potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing.<sup>11</sup>

Otonomi daerah yang ada di Indonesia telah diprioritaskan pada kewenangan daerah kabupaten dan daerah kota.<sup>12</sup> Kewenangan tersebut dimulai dari kewenangan atas dasar pembiayaan atau pendapatan yang diterima oleh daerah kabupaten dan kota. Kemampuan daerah dalam memanfaatkan pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah pusat merupakan suatu keberhasilan yang dapat dicapai oleh setiap daerah. Pembiayaan yang diperoleh oleh pemerintah daerah tersebut berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).<sup>13</sup>

---

<sup>8</sup> Suryana, “*Perekonomian Pembangunan Problematika dan Pendekatan, Salemba Empat*”, Jakarta, 2000, h.1

<sup>9</sup> Irwan Waris, “Pergeseran Paradigma Sentralisasi Ke Desentralisasi Dalam Mewujudkan Good Governance,” *Jurnal Kebijakan Publik* 3, no. 1 (2012): 38–47, <https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JKP/article/view/884/877>.

<sup>10</sup> Haw. Widjaja, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, 22.

<sup>11</sup> Deddy Supriady Bratakusuma dan Dadang Silihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, (PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2002), h. 24.

<sup>12</sup> Dadang Sufiyanto, “Pasang Surut Otonomi Daerah Di Indonesia”. (Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Jendral Achmad Yani, Bandung, 2020) h.18

<sup>13</sup> Mohammad Riduansyah, “*Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus*

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi salah satu bagian terpenting dalam pelaksanaan infrastruktur daerah. Pengelolaan APBD dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien supaya dapat dipertanggungjawabkan secara sosial. Salah satu komponen APBD yang penting dalam upaya pembangunan daerah yaitu penerimaan daerah. Penerimaan daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba usaha daerah, dan pendapatan daerah. Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>14</sup>

Kapasitas fiskal daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.<sup>15</sup> Peta kapasitas fiskal daerah adalah gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan indeks kapasitas fiskal daerah. Kapasitas fiskal dijadikan patokan untuk melihat seberapa besar potensi ekonomi yang bisa digali dan dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan daerah. Karena seperti yang kita ketahui bahwa kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu terbatasnya sumber-sumber pembiayaan untuk pelaksanaan desentralisasi sehingga kemandirian daerah dalam menjalankan rumah tangganya belum bisa berjalan maksimal. Salah satu indikator ketercapaian kemandirian daerah terhadap ketergantungan pemerintah pusat salah satunya bisa dilihat dari peta kapasitas fiskal dan indeks kapasitas fiskal.<sup>16</sup>

---

*Pemerintah Daerah Kota Bogor*". Makara, Sosial Humaniora, Vol. 7, No. 2, Desember 2003

<sup>14</sup> Ari Nurul Fatimah, Diah Agustina Prihastiwati & Vita Irawati, "Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Pdrb Terhadap Kesejahteraan Masyarakat". Accounting Global Journal, Vol. 4, No. 2 Oktober 2020 h. 124-138

<sup>15</sup> Deni Herdiyana, " Analisis Data Peta Kapasitas Fiskal Daerah ", Jurnal Pajak dan Keuangan Negara, Vol. 1, No. 1 (2019), h.112-133.

<sup>16</sup> Lisna Lisnawati, "Pengaruh Potensi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dan Kapasitas Fiskal Kabupaten/Kota Di Jawa Barat". Jurnal Ilmiah Rumpun Ekonomi , ISSN 2086-1613, 2018, Vol.8, No.1

**Tabel 1.1 Peta Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 s/d 2020 (dalam indeks)**

Kabupaten/ Kota	IKF		IKF		IKF		IKF	
	2017	Kategori	2018	Kategori	2019	Kategori	2020	Kategori
Lampung Barat	0,65	rendah	0,56	Rendah	0,55	Rendah	0,69	Redah
Lampung Selatan	0,81	sedang	0,94	Sedang	1,07	Sedang	0,99	Sedang
Lampung Tengah	1,04	seedang	0,99	Sedang	1,22	Tinggi	0,88	Sedang
Lampung Utara	0,61	rendah	0,62	Rendah	0,98	Sedang	0,67	Redah
Lampung Timur	1,03	sedang	0,32	sangat rendah	0,91	Sedang	1,61	Tinggi
Tanggamus	0,47	sangat rendah	0,26	sangat rendah	0,84	Sedang	0,69	Redah
Tulang Bawang	0,69	rendah	0,70	Rendah	0,61	Rendah	0,56	Redah
Way Kanan	0,54	rendah	0,64	Rendah	0,70	Rendah	0,56	Redah
Bandar Lampung	1,31	Tinggi	1,63	Tinggi	2,27	sangat tinggi	2,51	sangat tinggi
Metro	0,58	Rendah	0,62	Rendah	0,57	Rendah	0,72	Redah
Pesawaran	0,51	sangat rendah	0,53	sangat rendah	0,60	Rendah	0,50	sangat rendah
<b>Pringsewu</b>	0,52	<b>sangat rendah</b>	0,50	<b>sangat rendah</b>	0,56	<b>Rendah</b>	0,92	<b>Sedang</b>
Mesuji	0,54	Rendah	0,59	Rendah	0,49	sangat rendah	0,36	sangat rendah
Tulang Bawang Barat	0,55	Rendah	0,55	Rendah	0,48	sangat rendah	0,43	sangat rendah
Pesisir Barat	0,59	Rendah	0,55	Rendah	0,42	sangat rendah	0,69	Rendah

*Sumber : \*Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2017*

*\*Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.07/2018*

*\*Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2019*

*\*Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.07/2020*

Berdasarkan data kapasitas fiskal di atas dari tahun 2017 sampai tahun 2020 indeks kapasitas fiskal Kabupaten Pringsewu terjadi secara fluktuatif, indeks terendah terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 0,50 dan dikategorikan rendah, indeks tertinggi pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,92 dan dikategorikan sedang. Kabupaten Pringsewu dari tahun 2017-2020 menempati urutan 7 kapasitas fiskal di Provinsi Lampung, jika kita bandingkan dengan Ibukota Provinsi Bandar Lampung indeks kapasitas fiskal kabupaten Pringsewu masih tertinggal cukup jauh. Salah satu tujuan utama pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah berupaya untuk mewujudkan keseimbangan fiskal dengan mempertahankan kemampuan keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah dan sumber-sumber lainnya guna memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>17</sup>

**Tabel 1.2 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 s/d 2020 (Ribu Rupiah)**

Kabupaten/Kota	Pajak Daerah			
	2017	2018	2019	2020
Lampung Barat	7,032,595	11,617,377	13,376,646	9,720,735
Lampung Selatan	58,189,375	91,955,614	117,851,365	187,604,080
Lampung Tengah	50,062,308	72,206,626	92,615,976	87,000,000
Lampung Utara	16,729,576	24,074,685	25,519,983	23,000,000

<sup>17</sup> Lisna Lisnawati, "Pengaruh Potensi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dan Kapasitas Fiskal Kabupaten/Kota Di Jawa Barat". Jurnal Ilmiah Rumpun Ekonomi , ISSN 2086-1613, 2018, Vol.8, No.1

Lampung Timur	32,565,444	53,213,791	62,332,058	67,095,776
Tanggamus	24,890,838	17,664,599	20,571,076	39,545,608
Tulang Bawang	35,439,622	19,836,334	25,900,833	25,900,833
Way Kanan	14,530,537	18,384,783	19,861,797	21,400,536
Bandar Lampung	511,869,360	398,448,009	480,420,824	801,069,360
Metro	15,642,431	21,731,062	27,205,358	25,685,386
Pesawaran	17,250,000	24,664,796	28,562,590	27,435,700
<b>Pringsewu</b>	<b>16,906,000</b>	<b>21,289,348</b>	<b>23,521,005</b>	<b>30,877,603</b>
Mesuji	7,128,750	9,101,629	11,579,264	11,557,500
Tulang Bawang Barat	9,573,500	14,020,638	14,996,363	14,571,000
Pesisir Barat	4,012,382	6,415,256	7,189,279	7,084,777

*Sumber : Badan Pusat Statistik Lampung*

Berdasarkan data di atas realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Pringsewu terjadi peningkatan dari tahun 2017-2020 angka tertinggi pada tahun 2020 yaitu sebesar 30,877,603 dan angka terendah pada tahun 2017 sebesar 16,906,000. Dari tahun 2017 terjadi peningkatan secara berkala sampai tahun 2020. Jika di bandingkan dengan Kota Bandar Lampung sebagai Ibukota Provinsi Lampung pajak daerah Kabupaten Pringsewu masih terbilang rendah. Pajak daerah bandar lampung tertinggi pada tahun 2020 yaitu sebesar 801,069,360.<sup>18</sup>

<sup>18</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu.

**Tabel 1.3 Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 s/d 2020 (Ribu Rupiah)**

Kabupaten/Kota	Retribusi Daerah			
	2017	2018	2019	2020
Lampung Barat	1,560,957	2,014,963	2,227,953	4,203,205
Lampung Selatan	9,506,456	9,159,994	10,242,771	25,369,420
Lampung Tengah	5,693,824	7,085,161	10,498,044	9,828,575
Lampung Utara	2,178,500	1,904,993	2,232,602	1,990,500
Lampung Timur	11,246,100	5,715,508	3,925,575	5,455,890
Tanggamus	6,549,550	1,180,916	1,536,190	9,781,630
Tulang Bawang	2,736,985	1,530,350	1,244,629	1,244,629
Way Kanan	1,323,345	1,383,814	1,830,633	2,132,417
Bandar Lampung	85,684,132	29,579,486	29,626,488	83,927,660
Metro	6,067,270	5,604,727	,631,840	6,361,624
Pesawaran	3,159,900	5,232,815	11,117,343	10,803,000
<b>Pringsewu</b>	<b>4,102,000</b>	<b>3,327,703</b>	<b>3,441,510</b>	<b>3,448,446</b>
Mesuji	10,999,673	2,813,349	7,648,911	11,386,000
Tulang Bawang				
Barat	1,749,500	2,906,222	3,228,954	2,809,204
Pesisir Barat	5,000,963	2,880,783	3,252,733	5,610,634

*Sumber : Badan Pusat Statistik Lampung*

Retribusi daerah Kabupaten Pringsewu dari tahun 2017 sampai tahun 2020 terjadi secara fluktuatif. Angka tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 4,102,000 dan angka terendah terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 3,327,703 . jika di dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Lampung retribusi daerah Kabupaten Pringsewu masih tergolong rendah. Retribusi daerah Kota Bandar lampung angka tertinggi pada tahun 2015 yaitu sebesar 85,694,132.<sup>19</sup>

<sup>19</sup> Badan Pusat Statistik Pringsewu

**Tabel 1.4 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung (Milliar rupiah) 2017-2020**

Kabupaten/Kota	PDRB			
	2017	2018	2019	2020
Lampung Barat	4.509,54	4.738,86	4.984,63	4.927,79
Lampung Selatan	27.359,53	28.791,44	30.268,83	29.744,35
Lampung Tengah	43.107,05	45.406,22	47.837,70	47.347,97
Lampung Utara	14.882,71	15.672,53	16.508,06	16.269,34
Lampung Timur	27.496,84	28.518,18	29.606,13	28.929,63
Tanggamus	9.858,64	10.352,1	10.872,10	10.679,32
Tulang Bawang	14.242,03	15.014,47	15.827,46	15.612,3
Way Kanan	8.654,30	9.102,88	9.573,87	9.462,81
Bandar Lampung	34.921,08	37.084,49	39.385,65	38.656,70
Metro	3.865,01	4.084,67	4.312,58	4.235,49
Pesawaran	10.336,51	10.858,92	11.402,09	11.258,69
<b>Pringsewu</b>	<b>7.018,70</b>	<b>7.370,49</b>	<b>7.742,15</b>	<b>7.648,79</b>
Mesuji	6.320,64	6.655,53	7.005,86	6.911,12
Tulang Bawang Barat	7.078,06	7.451,02	7.850,70	7.747,24
Pesisir Barat	2.795,95	2.944,88	3.103,00	3.066,66

*Sumber : Badan Pusat Statistik Lampung*

Secara umum perekonomian di Kabupaten Pringsewu dilihat dari jumlah total nilai PDRB mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dari tahun ke tahun selama periode 2017-2020. Pada tahun 2019 PDRB Kabupaten Pringsewu mengalami peningkatan tertinggi yaitu sebesar 7.742,15 Miliar Rupiah, sedangkan PDRB terendah terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 7.018,70 Miliar Rupiah. Jika di dibandingkan dengan

kabupaten lainnya Kabupaten Pringsewu masih tergolong rendah, Kota Bandar Lampung sebagai salah satu Ibukota Provinsi Lampung Masih dengan jumlah PRDB tertinggi. Kota Bandar Lampung peningkatan tertinggi pada tahun 2019 yaitu sebesar 39.385,65 Miliar Rupiah dan angka terendah pada tahun 2017 sebesar 34.921,08 Miliar Rupiah. Pada pengamatan selama beberapa tahun terakhir peningkatan perekonomian di Kabupaten Pringsewu didominasi oleh sektor pertanian.<sup>20</sup>

Upaya dalam meningkat kapasitas fiskal daerah sangatlah penting dikarenakan kapasitas fiskal dijadikan patokan untuk melihat seberapa besar potensi ekonomi yang bisa digali dan dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan daerah. Karena yang kita ketahui bahwa terbatasnya sumber-sumber pembiayaan untuk melaksanakan desentralisasi, sehingga daerah dalam menjalankan aktivitasnya belum bisa berjalan secara maksimal dan masih banyak bergantung pada pemerintah pusat.<sup>21</sup>

Seperti yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kapasitas Fiskal Di Kabupaten Pringsewu Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2011-2020**

### **C. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Untuk memperjelas ruang lingkup masalah yang akan dibahas dan agar penelitian dilaksanakan secara fokus maka terdapat batasan masalah dalam penelitian ini. Fokus masalah dalam penelitian ini ialah Kapasitas Fiskal di Kabupaten Pringsewu Tahun 2011-2020. Adapun variabel bebas yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan PDRB.

---

<sup>20</sup> Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, *“Pertumbuhan Ekonomi Lampung Trivulan IV Tahun 2019”*, jadwal rilis 5 Februari 2020

<sup>21</sup> Lisna Lisnawati, *“Pengaruh Potensi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Kapasitas Fiskal Di Kabupaten/Kota Di Jawa Barat”*, Jurnal Akutansi Bisnis Dan Ekonomi, Volume 4 No. 2, September 2018

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pajak daerah berpengaruh terhadap Kapasitas Fiskal di Kabupaten Pringsewu tahun 2011-2020?
2. Apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap Kapasitas Fiskal di Kabupaten Pringsewu tahun 2011-2020?
3. Apakah PDRB berpengaruh terhadap Kapasitas Fiskal di Kabupaten Pringsewu tahun 2011-2020?
4. Bagaimana Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan PDRB terhadap Kapasitas Fiskal di Kabupaten Pringsewu tahun 2011-2020?
5. Bagaimana konsep dan penerapan pajak dalam persfektif ekonomi islam?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu berdasarkan rumusan masalah di atas yaitu:

1. Untuk mengetahui Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Kapasitas Fiskal di Kabupaten Pringsewu tahun 2011-2020.
2. Untuk mengetahui Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Kapasitas Fiskal di Kabupaten Pringsewu tahun 2011-2020.
3. Untuk mengetahui Pengaruh PDRB terhadap Kapasitas Fiskal di Kabupaten Pringsewu tahun 2011-2020.
4. Untuk mengetahui Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan PDRB terhadap Kapasitas Fiskal di Kabupaten Pringsewu tahun 2011-2020.
5. Untuk mengetahui konsep dan penerapan pajak di Kabupaten Pringsewu dalam persfektif ekonomi islam.

## **F. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis :

Bagi masyarakat pemerintah Kabupaten Pringsewu diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan informasi dan pertimbangan untuk perencanaan pembangunan daerah sehingga masyarakat dapat mempersiapkan diri dan mengambil langkah tepat untuk mengembangkan dan meningkatkan pendapatan daerahnya.

### 2. Manfaat Praktis :

Bagi penulis penelitian ini merupakan suatu proses pembelajaran dalam penerapan anatara teori dan praktik yang dituangkan dalam suatu karya ilmiah serta syarat untuk menyelesaikan pendidikan yang kini penulis tempuh dan bagi pembaca penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan menjadi refrensi penelitian berikutnya.

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi perbandingan dan acuan yang memberikan gambaran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu. Penelitian mengenai Kapasitas Fiskal di Indonesia telah banyak dilakukan namun dalam pembahasannya terdapat perbedaan antara penelitian yang satu dengan penelitian lainnya serta penelitian yang satu dengan penelitian lainnya serta hasil penelitiannya pun berbeda-beda dari tiap peneliti. Penelitian terdahulu juga dibutuhkan untuk menambah referensi dalam penyelesaian penelitian ini. Berikut adalah hasil dari beberapa penelitian terdahulu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Atria Tiffany Widyaningsih (2018) dengan judul Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kapasitas Fiskal Kota Pontianak dengan Menggunakan data time series. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut: 1). Berdasarkan hasil persamaan regresi, pajak daerah memiliki pengaruh negatif terhadap kapasitas fiskal sehingga apabila pajak daerah bertambah 1 (satu) rupiah mengakibatkan penurunan pada kapasitas fiskal sebesar -27,449. Hal ini menyatakan bahwa naik turunnya nilai realisasi pajak daerah memberikan pengaruh terhadap pendapatan dan alokasi-alokasi belanja suatu daerah yang mendukung infrastruktur belanja publik dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. 2). retribusi daerah memiliki pengaruh negatif terhadap kapasitas fiskal sehingga apabila retribusi daerah bertambah 1 (satu) rupiah mengakibatkan penurunan pada kapasitas fiskal sebesar -28,216. Hal ini menyatakan bahwa naik turunnya nilai realisasi retribusi daerah memberikan pengaruh terhadap pendapatan suatu daerah dan alokasi-alokasi belanja yang mendukung infrastruktur belanja publik dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat..3). PDRB memiliki pengaruh positif terhadap kapasitas fiskal sehingga apabila PDRB bertambah 1 (satu) rupiah mengakibatkan penurunan pada kapasitas fiskal sebesar 211.076,629. Hal ini menyatakan bahwa naik turunnya nilai PDRB memberikan pengaruh terhadap kapasitas fiskal, dikarenakan pertumbuhan perekonomian dihitung menggunakan PDRB sehingga apabila perekonomian Kota Pontianak meningkat maka PDRB juga akan ikut meningkat, begitu juga sebaliknya.<sup>22</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Lisna Lisnawati (2018) dengan judul Pengaruh Potensi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dan Kapasitas Fiskal Kabupaten/Kota Di Jawa Barat. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan diuji dengan regresi linier sederhana. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan mengenai pengaruh Potensi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli

---

<sup>22</sup> Tiffany Widyaningsih, “ Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kapasitas Fiskal Kota Potianak”, Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan, vol.7, no.3 (2018).

Daerah Dan Kapasitas Fiskal Kabupaten/Kota Di Jawa Barat, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1). Berdasarkan penelitian menggunakan analisis regresi sederhana, pengaruh potensi pajak daerah (X) terhadap pendapatan asli daerah (Y1) adalah berpengaruh. Hal ini sesuai dengan hipotesis, maka dari itu hipotesis diterima dimana terjadi kenaikan atau penurunan potensi pajak daerah mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD). 2). Berdasarkan hasil penelitian, pengaruh potensi pajak daerah (X) terhadap kapasitas fiskal (Y2) adalah tidak berpengaruh. Hal ini sesuai dengan hipotesis, maka hipotesis diterima. Artinya apabila terdapat kenaikan potensi pajak daerah, kapasitas fiskal akan mengalami penurunan.<sup>23</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Kamilaus Konstane Oki (2019) dengan judul Dampak Otonomi Daerah Terhadap Kapasitas Fiskal Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi NTT. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis pendekatan kuantitatif deskriptif dengan mengumpulkan data dan informasi, diuji dan dianalisis secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan mengenai Dampak Otonomi Daerah Terhadap Kapasitas Fiskal Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi NTT maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1.) Produk Domestik Regional Bruto (X1) adalah sebesar 3,158 lebih besar daripada t-tabel 1,78, maka variabel PDRB yang dimasukkan dalam model ini adalah signifikan atau secara parsial berpengaruh pada variabel Kapasitas Fiskal. Ini mengandung makna bahwa kenaikan PDRB akan mempengaruhi peningkatan kapasitas fiskal daerah dan juga PDRB memiliki pengaruh positif terhadap kapasitas fiskal daerah. PDRB yang terdiri dari tiga sektor dengan sembilan sub sektor, merupakan modal pembentukan kemampuan atau kapasitas fiskal daerah. 2). jumlah penduduk (X2) adalah

---

<sup>23</sup> Lisna Lisnawati, “Pengaruh Potensi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Kapasitas Fiskal Di Kabupaten/Kota Di Jawa Barat”, Jurnal Akutansi Bisnis Dan Ekonomi, Volume 4 No. 2, September 2018

1,540 dan t-tabel 1,78, hubungannya tidak signifikan. Karena nilai t-statistik lebih rendah dari t-tabel maka ini menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap kapasitas fiskal. Hal ini mengandung makna bahwa apabila terjadi tambahan jumlah penduduk sedangkan variabel lain dianggap konstan, maka tidak akan mempengaruhi kapasitas fiskal. 3). Dari uji F, nilai F-hitung adalah sebesar 31,816 dan F-tabel sebesar 5,19. Artinya nilai F-hitung lebih besar daripada F-tabel. Dengan demikian, mengartikan bahwa secara bersama-sama variabel independent berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Dengan pengertian lain, variabel PDRB, Jumlah Penduduk, Dana Alokasi Umum secara bersama memiliki hubungan yang signifikan dengan kapasitas fiskal.<sup>24</sup>

4. Penelitian terdahulu yang diteliti oleh Jacelin Joice Limpele, Debby Ch. Rotinsulu, Ita Pingkan F. Rorong, dalam penelitiannya tentang Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Serta Dampaknya Terhadap Kapasitas Fiskal Provinsi Sulawesi Utara menyimpulkan bahwa Belanja Langsung berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi sementara Belanja Tidak Langsung tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Utara dan Belanja Langsung berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Sulawesi Utara dan Belanja Tidak Langsung tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Sulawesi Utara, tetapi secara bersama Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Sulawesi Utara.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Kamilaus Konstanse Oki, “*Dampak Otonomi Daerah Terhadap Kapasitas Fiskal Kabupaten Timur Tengah Provinsi NTT*”, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol.4, No.2, (2019),h.1-10.

<sup>25</sup> Jacelin Joice Limpele, Debby Ch Rotinsulu, and Ita Pingkan F Rorong, “*Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah PROVINSI SULAWESI UTARA*,” Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah 22, no. 1 (2021): h. 97.

5. Dewi Adhityarani Musaidah, Ida Ayu Purba Riani, dan Elsyhan R. Marlissa, dengan judul penelitian Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Investasi Dan Penduduk Terhadap Produk Domestik Regional Bruto, Kapasitas Fiskal Dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Di Provinsi Papua. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Kapasitas Fiskal, Pengeluaran Pemerintah Daerah, Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Penduduk secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto dengan total pengaruh sebesar 99,92 persen, sedangkan sisanya sebesar 0,08 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diamati di dalam penelitian ini. Produk Domestik Regional Bruto, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kapasitas Fiskal dengan total pengaruh sebesar 91,36 persen, sedangkan sisanya sebesar 8,64 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diamati di dalam penelitian ini. Produk Domestik Regional Bruto, Kapasitas Fiskal, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Penduduk secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengeluaran Pemerintah Daerah dengan total pengaruh sebesar 53,43 persen, sedangkan sisanya sebesar 46,57 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diamati di dalam penelitian ini.<sup>26</sup>
6. Sherly Eringa, Dedi Budiman Hakim, Bambang Juanda, dengan judul penelitian Analisis Potensi Pajak Daerah untuk Peningkatan Kapasitas Fiskal Kabupaten dan Kota di Sulawesi Utara. Hasil Penelitian ini menemukan bahwa pendapatan per kapita, share sektor pertanian, dan jumlah siswa sekolah menengah atas merupakan faktor-faktor yang berperan penting dalam memengaruhi penerimaan pajak daerah di kabupaten dan kota yang ada di Sulawesi Utara. Ditemukan juga adanya gap yang cukup lebar antara pusat

---

<sup>26</sup> Dewi Adhityarani Musaidah, Ida Ayu Purba Riani, and Elsyhan R. Marlissa, "Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Investasi Dan Penduduk Terhadap Produk Domestik Regional," (Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah, 2017), h. 31.

kota provinsi dengan daerah lainnya. Perhitungan potensi pajak restoran menunjukkan hasil bahwa penerimaan pajak restoran yang selama ini diterima oleh pemerintah daerah masih berada di bawah nilai potensi pajak yang dimiliki oleh daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengidentifikasi dan menentukan potensi riil pajak daerah masih perlu ditingkatkan. Hasil regresi menunjukkan pembangunan ekonomi yang diproksi oleh pendapatan per kapita memiliki nilai elastisitas yang lebih besar dibandingkan variable lain. Dengan demikian, peningkatan dalam pendapatan per kapita akan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap penerimaan pajak daerah.<sup>27</sup>

7. Salman Alfarisi H dengan judul penelitian Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Daerah provinsi Sumatera Barat. Sampel pada penelitian ini berjumlah 19 Kabupaten/kota. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan kuesioner. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan bantuan SPSS versi 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pajak daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penerimaan pajak daerah yang tinggi menunjukkan kinerja keuangan pemerintah yang baik, (2) Retribusi daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penerimaan retribusi yang tinggi menunjukkan kinerja keuangan pemerintah yang baik meski tidak terlalu signifikan, (3) Dana perimbangan berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penerimaan dana perimbangan yang tinggi menunjukkan tingkat ketergantungan yang tinggi pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam

---

<sup>27</sup> Sherly Ering, Dedi Budiman, and Bambang Juanda, "Analisis Potensi Pajak Daerah Untuk Peningkatan Kapasitas Fiskal Kabupaten Dan Kota Di Sulawesi Utara," (Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia 17, no. 1, 2017), h. 84–86.

membiayai dan mengelola daerah, sehingga dapat dikatakan kinerja keuangan pemerintah belum optimal.<sup>28</sup>

8. Surya Asih ; Irawan dengan judul penelitian Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Bagi Hasil Pajak Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pemerintahan Kabupaten Dan Kota. Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah laporan realisasi pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara berjumlah 33 Kabupaten Kota. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi dari laporan APBD. Teknik analisis data menggunakan regresi berganda dan uji moderating. Regresi berganda dilakukan untuk menguji secara simultan (uji F) dan parsial (uji t), sedangkan uji moderating menggunakan uji Residual. Hasil penelitian ini membuktikan pengujian secara simultan dapat dibuktikan bahwa Kontribusi Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah dan Bagi Hasil Pajak secara simultan terhadap Belanja Daerah. Hasil pengujian secara parsial dapat dibuktikan bahwa Kontribusi Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara. Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara. Hasil Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara. Hasil pengujian moderating regression analysis (MRA) dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi bukan merupakan variabel moderating yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara Kontribusi Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah dan Bagi Hasil Pajak terhadap Belanja Daerah

---

<sup>28</sup> Salman Alfarisi H, "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat)," Jurnal Akuntansi, Vol. 3, No. 1, 2015.

Provinsi Sumatera Utara.<sup>29</sup>

9. Muhammad Fachrozi dengan judul penelitian Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Kalimantan Barat. Populasi dalam penelitian ini ialah seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 14 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini mengambil data dari tahun 2015 – 2019. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif menggunakan SPSS versi 24. Sebelum menganalisis data, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik kemudian dilanjutkan dengan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan Uji T, Uji F, dan Uji Koefisien Determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemampuan Keuangan Daerah.<sup>30</sup>
10. Saprudin dengan judul penelitian Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Terhadap Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo. Metode Penelitian ini menggunakan penelitian asosiatif yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih Hipotesis penelitian diuji dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan uji-t dan uji-F. Metode analisis regresi linear berganda berfungsi untuk mengetahui pengaruh / hubungan dari variabel bebas dengan variabel terikat. Pengolahan data akan dilakukan dengan menggunakan alat bantu aplikasi software SPSS for windows. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan perhitungan statistik, menunjukkan nilai koefisien regresi X1 terhadap Y sebesar

---

<sup>29</sup> Surya Asih ; Irawan, “Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Bagi Hasil Pajak Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pemerintahan Kabupaten Dan Kota,” Jurnal Ilmiah Online, Vol. 9, No. 1, 2018.

<sup>30</sup> Muhammad Fachrozi, “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Kalimantan Barat,” Jurnal Kajian Ilmiah Akutansi, Vol. 10, No. 3, 2020.

0,271 dengan thitung = 3.332 dan nilai signifikansi 0,154 lebih besar dari tingkat signifikansi  $\alpha = 0,05$ , hal ini berarti bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan Pajak Daerah terhadap Kemampuan Keuangan Daerah Daerah. Bahwa adanya pengaruh positif tersebut berarti semakin tinggi Pajak Daerah, maka Kemampuan Keuangan Daerah Daerah akan mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan perhitungan statistik, menunjukkan nilai koefisien regresi  $X_2$  terhadap  $Y$  sebesar 0,084 dengan thitung = 3.360 dan nilai signifikansi 0,654 lebih besar dari tingkat signifikansi  $\alpha = 0,05$ , hal ini berarti bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan Retribusi Daerah terhadap Kemampuan Keuangan Daerah Daerah. Bahwa adanya pengaruh positif tersebut berarti semakin tinggi Retribusi Daerah, maka Kemampuan Keuangan Daerah Daerah akan mengalami peningkatan.<sup>31</sup>

Berdasarkan dengan penelaian terdahulu, penelitian ini akan meneliti mengenai Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Kapasitas Fiskal di Kabupaten Pringsewu. Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah :

- a. Variabel yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Pajak Daerah, Kapasitas Fiskal, Produk Domestik Regional Bruto dan Kapasitas Fiskal.
- b. Data penelitian yang digunakan Tahun 2011-2020.
- c. Penelitian ini ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam.

Berdasarkan penelitian dengan Judul “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Kapasitas Fiskal Tahun 2011-2020 Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam” merupakan penelitian yang belum pernah dilakukan sebelumnya.

---

<sup>31</sup> Saprudin, “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Terhadap Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo,” *Gorontalo Accounting Journal*, Vol. 1, No. 1, 2020. P-ISSN 2614:2074

## **Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai penelitian ini maka sistematika penulisan ini adalah :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, batasan masalah rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian peneliti terdahulu yang relevan dan sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS**

Bab ini berisi tentang teori umum mengenai Kapasitas Fiskal di Kabupaten Pringsewu, pengaruh Pajak Daerah yang mencakup ( definisi pajak daerah, unsur pajak daerah dan fungsi pajak daerah. Retribusi daerah mencakup (definisi retribusi daerah, ciri-ciri retribusi daerah, jenis-jenis retribusi daerah.) Produk Domestik Regional Bruto mencakup (definisi produk domestik regional bruto, peran konsep pendekatan perhitungan dalam PDRB, jenis-jenis produk domestik regional bruto). Konsep Kapasitas Fiskal dalam Islam, kerangka berfikir, Hipotesis..

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang waktu dan tempat penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampel, dan teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, metode analisis data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan tentang pembahasan hasil penelitian dan analisis.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**



## BAB II

### LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOSTESIS

#### A. Teori Yang Digunakan

##### 1. Teori Otonomi daerah

Grand theory pada penelitian ini adalah Otonomi Daerah. Otonomi daerah merupakan pemberian kebebasan untuk mengurus rumah tangga sendiri, tanpa mengabaikan kedudukan Pemerintah Daerah sebagai aparat Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan urusan – urusan yang ditugaskan kepadanya.<sup>32</sup> Hakekat otonomi daerah adalah pemberian wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Otonomi juga diartikan sebagai sesuatu yang bermakna kebebasan atau kemandirian. Kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan.

Pengertian otonomi daerah menurut para ahli :

- a. Menurut F. Sugeng Istianto: Otonomi Daerah adalah sebuah hak dan wewenang untuk mengatur serta mengurus rumah tangga daerah.
- b. Menurut Syarif Saleh: Otonomi Daerah merupakan hak yang mengatur serta memerintah daerahnya sendiri dimana hak tersebut merupakan hak yang diperoleh dari pemerintah pusat.
- c. Menurut Kansil: Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, serta kewajiban daerah untuk mengatur serta mengurus

---

<sup>32</sup> Dewi Mulyanti, “Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah Melalui Judicial Review dan Executive Review,” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol 5, no. 1 (2017): 7

daerahnya sendiri sesuai perundang-undangan yang masih berlaku.<sup>33</sup>

Penerapan Otonomi Daerah, Penerapan (Pelaksanaan) otonomi daerah di Indonesia menjadi titik fokus penting dalam memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah bisa disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan ciri khas daerah masing-masing. Hubungan otonomi daerah dengan penelitian ini adalah PAD menjadi bagian sumber keuangan terbesar bagi pelaksanaan otonomi daerah menunjukkan bahwa PAD merupakan tolak ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah. Di samping itu PAD juga mencerminkan kemandirian suatu daerah.<sup>34</sup>

## 2. Kapasitas Fiskal

Pertumbuhan ekonomi merupakan parameter dari suatu kegiatan pembangunan, hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi dapat mengukur tingkat perkembangan aktivitas pada sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian. Peta kapasitas fiskal daerah disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 19 Ayat (1) PP Nomor 30 Tahun 2011<sup>35</sup> tentang Pinjaman Daerah dan Pasal 13 Ayat (2) PP Nomor 2 Tahun 2012<sup>36</sup> tentang Hibah Daerah. Untuk memenuhi ketentuan tersebut Menteri Keuangan telah menetapkan PMK Nomor 119/PMK.07/2017<sup>37</sup> tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah. Dalam ketentuan umum Kapasitas Fiskal diartikan sebagai gambaran dari kemampuan keuangan masing masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi

---

<sup>33</sup> Dewi Mulyanti, “Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah Melalui *Judicial Review dan Executive Review*,” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol 5, no. 1 (2017): 8

<sup>34</sup> Syahril dan Sotuyo, “Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Lhokseumawe,” *Jurnal Kebangsaan*, Vol 3, No. 5 (2014): 21

<sup>35</sup> PP Nomor 30 Tahun 2011

<sup>36</sup> PP Nomor 2 Tahun 2012

<sup>37</sup> PMK Nomor 119/PMK.07/2017

dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja pegawai. Sedangkan Peta Kapasitas Fiskal Daerah didefinisikan sebagai gambaran kemampuan keuangan yang dikelompokkan berdasarkan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah. Peta Kapasitas Fiskal Daerah dapat digunakan untuk:

- a. Pengusulan Pemerintah Daerah sebagai penerima hibah
- b. Penilaian atas usulan pinjaman daerah Penentuan besaran dana pendamping, jika dipersyaratkan
- c. Hal-lain yang diatur secara khusus dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

Hal penting yang perlu ditegaskan adalah Peta Kapasitas Fiskal tidak digunakan untuk menghitung alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa, termasuk Dana Insentif Daerah. Peta Kapasitas Fiskal Daerah menggambarkan kemampuan fiskal suatu daerah dalam membelanjakan anggaran secara lebih leluasa dan menggambarkan kapasitas fiskal relatif suatu daerah terhadap daerah lain dalam tahun yang sama. Sebaliknya kapasitas fiskal daerah tidak menggambarkan dampak kebijakan desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat karena tidak memperhitungkan indikator-indikator kesejahteraan dan pembangunan dan tidak menggambarkan kinerja keuangan suatu daerah.<sup>38</sup>

Dalam meningkatkan kemandirian daerah, pemerintah daerah harus berupaya terus-menerus dalam menggali dan meningkatkan sumber keuangan daerahnya sendiri sesuai dengan potensinya. Untuk mendukung upaya peningkatan PAD, perlu diadakan pengukuran atau penilaian sumber-sumber PAD agar dapat dipungut secara berkesinambungan tanpa memperburuk alokasi faktor produksi serta dapat pula

---

<sup>38</sup> Deni Herdiyana, "Analisis Data Peta Kapasitas Fiskal Daerah," *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara* 1, no. 1 (2019): 112–33.

dilakukan dengan meningkatkan jumlah obyek dan subyek pajak dan/atau retribusi daerah.<sup>39</sup>

Dalam rangka penciptakan good governance dengan akuntabilitas publik yang kuat, maka laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan tersebut harus diupayakan untuk dapat secara sederhana dianalisis keterukurannya (*akuntable*) dan diakses dengan mudah (*transparan*) oleh umum (*public*) dalam format yang lebih sederhana pada setiap variabel sesuai dengan sistem dan standar akuntansi.<sup>40</sup>

Dalam rangka mendukung sumber pembiayaan pembangunan daerah, perlu dikembangkan kebijakan fiskal dengan memperhatikan prinsip keadilan, efisiensi, dan efektifitas untuk menambah penerimaan daerah tersebut. Sejalan dengan kebijakan fiskal pajak dan retribusi merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan untuk melaksanakan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab.<sup>41</sup>

Metode pengukuran kapasitas fiskal ini membutuhkan data yang lengkap, akurat dan detil sehingga sulit untuk dipenuhi terutama di negara-negara berkembang. Oleh karena itu, kapasitas fiskal sering diukur dengan menggunakan variabel atau indikator lain, diantaranya yang pertama yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kapasitas fiskal daerah yang dapat diukur dengan mengalikan PDRB terhadap rasio penerimaan PDB standar (*standard revenue/ personal incomeratio*), dimana rasio standar merupakan rata-rata

---

<sup>39</sup> Parson Horota, Ida Ayu Purbariani, Robert M. Marbun, "Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Melalui Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Jayapura", Jurnal Keuda Vol.2, no.1, h.33.

<sup>40</sup> Atria Tiffany Widyarningsih, "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kapasitas Fiskal Kota Pontianak". Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan (JEBIK) 2018, Vol.7, No.3, 221-222

<sup>41</sup> Kadar Pamuji, "Kebijakan Pengelola Pajak Daerah dalam Kerangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Analisa Terhadap Implementasi Wewenang Pengelolaan Pajak Daerah oleh Pemerintah Pusat dan Pemerinta Daerah)", Fakultas Hukum Universitas Jendral Sudirman Purwokerto, h.15.

nasional ataupun rata-rata dari beberapa kelompok daerah. Kelemahan utama dari cara ini adalah indikator PDRB cenderung mengabaikan kenyataan bahwa struktur perekonomian yang berbeda antar daerah bisa memiliki dampak yang signifikan terhadap kemampuan daerah untuk menghimpun pendapatan, misalnya PDRB per kapita yang sama dan daerah sektor pertaniannya yang lebih dominan bisa memiliki potensi pendapatan pajak lebih rendah dibanding daerah lainnya yang didominasi sektor manufaktur dan jasa-jasa.<sup>42</sup>

Kedua, yaitu pendapatan perorangan (jumlahan dari seluruh pendapatan penduduk setempat). Kapasitas fiskal daerah dapat juga diukur dari total pendapatan perorangan dikalikan dengan rasio standar dari penerimaan terhadap pendapatan perorangan (*standard revenue/personal income ratio*). Tentu saja cara ini bukan ukuran untuk menentukan kapasitas fiskal yang sempurna, mengingat pendapatan perorangan hanya salah satu dari sumber penerimaan yang tidak proporsional dengan jumlah seluruh basis pajak.<sup>43</sup>

Ketiga, adalah jumlah penjualan ritel di daerah. Apabila pajak yang didasarkan atas konsumsi penting sebagai sumber penerimaan untuk daerah, ini bisa dijadikan proksi yang baik bagi basis pajaknya. Kapasitas fiskal diukur dengan mengalikan jumlah penjualan ritel dengan rasio penerimaan terhadap total penjualan standar (*standard revenue to total retail sales ratio*).<sup>44</sup>

Dalam penyusunan peta Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kotasebagimana di mangsut dalam pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu :

---

<sup>42</sup> Atria Tiffany Widyaningsih, "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kapasitas Fiskal Kota Pontianak". Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan (JEBIK) 2018, Vol.7, No.3, 221-222

<sup>43</sup> Robert A. Simanjuntak, "Kebutuhan Fiskal, Kapasitas Fiskal dan Optimalisasi Potensi PAD", (Jakarta : LPEM, 2005).h.5

<sup>44</sup> Atria Tiffany Widyaningsih, "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kapasitas Fiskal Kota Pontianak". Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan (JEBIK) 2018, Vol.7, No.3, 223

- a. Tahap I, perhitungan Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota; dan
- b. Tahap II, perhitungan indeks Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota.

Perhitungan Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana di maksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf a didasarkan pada fomula sebagai berikut :

$KFD_{kabupaten/kota-i} = \text{pendapatan} - [\text{pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan} + \text{belanja tertentu}]$

Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain lain pendapatan yang sah

Pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Dana bagi hasil cukai hasil tembakau
- b. Dana alokasi khusus fisik
- c. Dana alokasi khusus non fisik
- d. Dana otonomi khusus
- e. Dana bagi hasil sumber daya alam mineral dan gas dalam rangka otonomi khusus
- f. Dana desa

Dana alokasi khusus nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e tidak termasuk dana tunjangan profesi guru negeri sipil daerah dan dana tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil daerah.

Belanja tertentu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Belanja pegawai
- b. Belanja bagi hasil

Alokasi dana desa Perhitungan indeks Kapasitas Fiskal daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b di dasarkan pada formula sebagai berikut :

$$\text{IKFD kabupaten/ kota-}i = \frac{\text{KFD kabupaten/kota-}i}{\left( \sum \text{KFD kabupaten/kota} \right) / n}$$

Keterangan:

IKFD *kabupaten/kota-i* = Indeks kapasitas fiskal daerah suatu kabupaten/kota

KFD *kabupaten/kota-i* = Kapasitas fiskal daerah suatu kabupaten/kota

$\sum \text{KFD kabupaten/kota}$  = Total kapasitas fiskal daerah kabupaten/kota

n = 508 (lima ratus delapan) daerah kabupaten/kota

Berdasarkan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah provinsi dan kabupaten sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), daerah provinsi di kelompokkan menjadi 5 (lima) kategori Kapasitas Fiskal Daerah sebagai berikut :

<b>Rentang IKFD</b>	<b>Kategori Kapasitas Fiskal Daerah</b>
IKFD < 0,277	Sangat Rendah
0,277 ≤ IKFD < 0,564	Rendah
0,564 ≤ IKFD < 0,934	Sedang
0,934 ≤ IKFD < 1,920	Tinggi
IKFD ≤ 1,920	Sangat Tinggi

Perhitungan kapasitas fiskal daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 6 menggunakan data penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 tentang perubahan atas peraturan presiden Nomor 54 tahun

2020 tentang perubahan postur dan rician anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2020.<sup>45</sup>

### 3. Pajak Daerah

#### A. Definisi Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>46</sup> Setelah dikeluarkan Undang-Undang yang baru yaitu Undang-Undang No.28 Tahun 2009, pengaturan pajak dan retribusi daerah lebih limitatif, dilakukan perluasan basis pajak dan jenis retribusi yang menjadi kewenangan daerah. Sumber-sumber pembiayaan yang diserahkan kepada daerah itu nantinya akan dimanifestasikan lewat struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kuat. PAD inilah sumber pembiayaan yang memang benar-benar digali dari daerah itu sendiri sehingga dapat mencerminkan kondisi riil daerah. Jika nantinya struktur PAD sudah kuat, boleh dikatakan daerah tersebut memiliki kemampuan pembiayaan yang juga kuat. Untuk itu tentu dibutuhkan suatu struktur industri yang mantap beserta obyek pajak dan retribusi yang taat.<sup>47</sup>

Definisi Pajak menurut para ahli, diantaranya adalah:

- a. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-Undang dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk

---

<sup>45</sup> “Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 120/PMK.07/2020,” 2020.

<sup>46</sup> Trisni suryarini, Tarsis Tarmudji, *Pajak di Indonesia* (Yogyakarta:Graha Ilmu,2012). h. 75.

<sup>47</sup> Atria Tiffany Widyaningsih, “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kapasitas Fiskal Kota Pontianak”. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan (JEBIK)* 2018, Vol.7, No.3, 218

membiaiyai pengeluaran umum.<sup>48</sup>

- b. Prof Dr. P.J.A. Andriani Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah.<sup>49</sup>

Berdasarkan pengertian pajak oleh beberapa ahli, maka pengertian pajak menurut penulis adalah iuran wajib masyarakat kepada kas Negara yang bersifat memaksa dengan imbalan yang tidak langsung dirasakan oleh masyarakat dan digunakan untuk keperluan Negara.

Kewenangan dalam pemungutan pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa kewenangan dan ketentuan pemungutan pajak daerah diberikan kepada masing-masing pemerintah daerah. Dalam hal ini, setiap daerah wajib untuk mengaturnya sendiri berdasarkan potensi yang dimiliki ke dalam peraturan di tingkat daerah dengan tetap mengacu pada undang-undang tersebut. Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 dijelaskan bahwa setiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur serta mengurus sendiri berbagai keperluan pemerintahannya. Dengan kata lain, pemungutan pajak daerah dilakukan dengan tujuan untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Komponen sumber PAD tersebut khususnya pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif untuk peningkatan PAD menjelaskan bahwa

---

<sup>48</sup> Munawir, Pokok-Pokok Perpajakan (Yogyakarta: Liberty, 1985), h. 1.

<sup>49</sup> Pohan and Chairil Anwar, Perpajakan Indonesia (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014).

peranan sektor pajak daerah dan retribusi yang paling besar kontribusinya terhadap PAD, yang dimana pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah itu sendiri. Dalam menyelenggarakan pembangunan di daerahnya, faktor sumber pendapatan daerah dan retribusi daerah sangat menentukan terlaksananya pembangunan daerah itu sendiri.<sup>50</sup>

## **B. Unsur-Unsur Pajak**

Beberapa unsur-unsur pajak yaitu:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara Yaitu berhak memungut pajak hanyalah negara iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- b. Berdasarkan undang-undang Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa Jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung yang dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

## **C. Fungsi Pajak**

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak

---

<sup>50</sup> Dr. Tjip Ismail, S.H., M.BA., M.M., “*Analisis Dan Evaluasi Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah*”, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ri 2013.

mempunyai beberapa fungsi, yaitu: <sup>51</sup>

- a. Fungsi Penerimaan (Budgetair) yaitu sebagai alat (sumber) untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk kepentingan pembiayaan pembangunan daerah. Fungsi ini juga tercermin dalam prinsip efisiensi yang menghendaki pemasukan yang sebesar-besarnya dengan pengeluaran yang sekecil-kecilnya dari suatu penyelenggaraan pemungutan pajak daerah.
- b. Fungsi Mengatur (Regulated) Yaitu sebagai alat atau instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di bidang keuangan (bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan keamanan) yang dimiliki daerah. Dalam hal ini, penerapan pajak daerah bisa membantu untuk mempengaruhi tingkat konsumsi atas barang atau jasa tertentu.

Meskipun pajak juga mempunyai fungsi untuk mengatur kebijaksanaan negara dalam ekonomi dan sosial, namun fungsi yang terutama adalah sebagai sumber keuangan negara, karena dalam anggaran belanja pendapatan negara sebagian besar dipenuhi dari sektor pajak.<sup>52</sup>

#### **4. Retribusi Daerah**

##### **A. Definisi Retribusi Daerah**

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan dan /atau di berikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.<sup>53</sup> Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 menyebutkan terdapat tiga jenis objek retribusi yaitu : 1). Objek Retribusi Jasa Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 109 Undang-Undang No.28 Tahun 2009, adalah pelayanan yang disediakan atau

---

<sup>51</sup> Mardiasmo, Perpajakan (Yogyakarta: Andi, 2011), h. 12.

<sup>52</sup> Munawir, Pokok-Pokok Perpajakan

<sup>53</sup> Trisni suryarini, Tarsis Tarmudji, Pajak di Indonesia (Yogyakarta:Graha Ilmu,2012). h. 77.

diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ; 2). Objek Retribusi Jasa Usaha, sebagaimana diatur dalam Pasal 126 Undang-Undang No.28 Tahun 2009, adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan memanfaatkan keuangan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta ; 3). Objek Retribusi Perizinan Tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 140 Undang-Undang No.28 Tahun 2009, adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, sumber daya alam, barang, sarana dan prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.<sup>54</sup>

Pajak daerah dan retribusi daerah mempengaruhi kemandirian daerah dan juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Pajak dan retribusi daerah yang tinggi berarti jumlah uang yang masuk ke kas daerah semakin banyak, sehingga pemerintah daerah berupaya untuk memajukan perekonomian daerahnya.<sup>55</sup>

## **B. Ciri-ciri Retribusi Daerah**

Adapun ciri-ciri retribusi daerah, yaitu:

- a. Dipungut oleh pemerintah daerah, dan diatur dalam peraturan daerah tersebut.
- b. Dapat dipungut apabila ada jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dan dinikmati oleh orang atau badan.

---

<sup>54</sup> Walikota Tangerang Selatan, "Walikota Tangerang Selatan," 2014.

<sup>55</sup> R Rosdiyati, I Kurniyawati, and L N Anikah, "PKM: Seminar Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Untuk Menentukan Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur," ... *Kepada Masyarakat (PkM)* 3,no.1(2020):67–70, <http://iocscience.org/ejournal/index.php/abdimas/article/view/689>.

- c. Pihak yang membayar retribusi daerah mendapatkan imbalan/balas jasa secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
- d. Wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran retribusi daerah dapat dikenakan sanksi ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi daerah tidak memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- e. Hasil penerimaan retribusi daerah disetor ke kas daerah.<sup>56</sup>

Selain pajak daerah hasil penerimaan retribusi memiliki peranan yang besar terhadap APBD khususnya bagi daerah kabupaten/kota sebagai sumber pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah. Pengelolaan sistem pemungutan retribusi daerah yang baik akan sangat membantu mengoptimalkan penerimaan daerah sesuai dengan potensi yang ada.

Pengaturan kewenangan perpajakan dan retribusi yang ada merupakan implementasi pelaksanaan otonomi daerah. Pemberian kewenangan yang semakin besar kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat seharusnya diikuti dengan pemberian kewenangan yang besar pula dalam perpajakan dan retribusi.

### C. Jenis-jenis Retribusi Daerah

jenis-jenis retribusi daerah terbagi atas 3 golongan yaitu :

- a. Retribusi Jasa Umum yang terdiri atas Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan,

---

<sup>56</sup> Vera Ningsih Siahian, "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pad Sah, Dau, Dak Dan Dbh Terhadap Belanja Modal Dengan Pdrb Sebagai Variabel Moderating Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara", Vol.2.no.3(2016): 22-23,  
<https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/623/157017075.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

- b. Retribusi Jasa Usaha terdiri atas Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir atau Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggarahan / Villa, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga, Retribusi Penyeberangan di Air dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- c. Yang terakhir adalah Retribusi Perizinan Tertentu yang terdiri atas Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

## **5. Produk Domestik Regional Bruto**

### **A. Definisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Pengertian produk domestik regional bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau merupakan seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi disuatu wilayah. Penghitungan PDRB dapat dilakukan dengan menggunakan metode langsung

dan alokasi.<sup>57</sup>

Menurut Widodo indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga yang berlaku atau atas dasar harga konstan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga konstan adalah jumlah nilai produksi, pendapatan atau pengeluaran berdasarkan harga pada tahun dasar. Cara penghitungan atas dasar harga konstan ini telah menghilangkan pengaruh harga atau inflasi, sehingga dikatakan menunjukkan nilai riil (nyata).<sup>58</sup>

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku dihitung berdasarkan harga-harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan, yang berarti termasuk kenaikan harga-harga ikut dihitung.<sup>59</sup> Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi sumber daya alam dan faktor produksi daerah tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor tersebut menyebabkan besaran PDRB bervariasi antar daerah.<sup>60</sup>

## **B. Peran Konsep Pendekatan perhitungan dalam PDRB**

Perhitungan PDRB dapat dilakukan dengan dua metode yaitu metode langsung dan tidak langsung (alokasi)

### **a. Metode langsung**

Cara perhitungan PDRB dapat diperoleh melalui tiga

---

<sup>57</sup> Katalog Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang, *Produk Domestik Regional bruto Kabupaten Tulang Bawang Menurut Lapangan Usaha*” h. 110.

<sup>58</sup> Badan Pusat Statistik

<sup>59</sup> Katalog Bps, “Kerjasama : BAPPEDA Kabupaten Kudus Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ),” n.d.

<sup>60</sup>Ufira Isbah dan Rita Yani Iyan, “Analisis Peran Sektor Pertanian Dalam Perekonomian dan Kesempatan Kerja Di Provinsi Riau”, *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*”, Tahun VII, No.19, (November 2016), h. 49-50.ss

pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan

1) Menurut pendekatan Produksi

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh suatu kegiatan ekonomi di daerah tersebut dikurangi biaya antara masing-masing total produksi bruto tiap kegiatan subsektor atau sektor dalam jangka waktu tertentu (satu tahun).<sup>61</sup>

2) Menurut pendekatan pengeluaran

Produk Domestik Regional Bruto adalah penjumlahan semua komponen permintaan akhir. Komponen tersebut meliputi pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok, dan ekspor *netto*.<sup>62</sup>

3) Menurut Pendekatan Pendapatan

Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa produksi yang dimaksud adalah upah, gaji, sewa rumah, bunga modal dan keuntungan. Semua hitungan tersebut sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak lainnya.<sup>63</sup>

## b. Metode Tidak Langsung

Dalam metode ini PDRB suatu wilayah diperoleh dengan

---

<sup>61</sup> Ischak Pandapotan Lumbantobing, "Pengaruh Investasi Dalam Negeri, Investasi Luar Negeri Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Produk Domestik Bruto Di DKI Jakarta," *Jurnal Riset Ekonomi Dan Manajemen* 17, no. 1 (2017): 125–46.

<sup>62</sup> Zaenal Arifin, "Memahami PDRB Sebagai Instrumen Untuk Mengukur Pertumbuhan Ekonomi Di Daerah," *Https://Bappeda.Jambiprov.Go.Id*, 2009, 1–3, [https://bappeda.jambiprov.go.id/welcome/download\\_file\\_artikel/Artikel\\_PDRB.pdf](https://bappeda.jambiprov.go.id/welcome/download_file_artikel/Artikel_PDRB.pdf).

<sup>63</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 93

menghitung PDRB wilayah tersebut melalui wilayah yang lebih luas. Untuk melakukan alokasi PDRB wilayah ini digunakan beberapa alaktor antara lain: jumlah produksi fisik; tenaga kerja; penduduk, dan alaktor tidak langsung lainnya. Dengan menggunakan salah satu atau beberapa alaktor dapat diperhitungkan persentase bagian masing- masing provinsi terhadap nilai tambah setiap sektor dan subsector.<sup>64</sup>

### C. Jenis-jenis Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB)

Jenis-jenis produk domestik regional bruto (PDRB) diantaranya yaitu :

- a. sektor primer yaitu terdiri dari pertanian dan pertambangan,
- b. sektor sekunder terdiri dari industri, bangunan, listrik, gas dan air.
- c. sektor tersier yaitu terdiri dari perdagangan, perbankan dan jasa lainnya.<sup>65</sup>

Peranan pendapatan daerah (PDRB) terhadap kapasitas fiskal sangat penting, karena semakin banyak sektor PDRB akan semakin banyak pajak yang di hasilkan untuk pemerintah pusat dan daerah. Tingginya permintaan akan meningkatkan keuntungan perusahaan dan akan mengasikkan biaya eskternal atau keuntungan pada produsen dan konsumen dan pemerintah akan ikut campur tangan dan menetapkan pajak Apabila PDRB meningkat maka investasi akan bertambah tinggi juga.<sup>66</sup> Dan kapasitas fiskal disuatu daerah juga akan meningkat.

---

<sup>64</sup> Ibid h.93

<sup>65</sup> Dio Syahrullah, “*Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendidikan, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Banten Tahun 2009-2012*”. (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014), h, 1112.

<sup>66</sup> Habiburrahman, “*Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Lampung*”, Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol.3 No.1 (Oktober 2012), h.106.

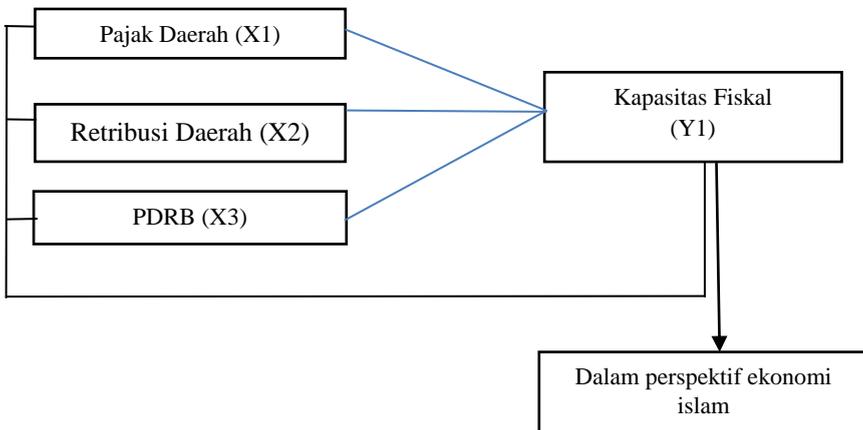
## 6. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kapasitas fiskal di gunakan untuk melihat seberapa besar kemampuan keuangan yang dimiliki oleh masing-masing daerah sehingga semakin tinggi kapasitas fiskal disuatu daerah maka daerah tersebut sudah mampu untuk membiayai rumah tangganya sendiri dan tidak terlalu bergantung pada pemerintah pusat.

Dalam perkembangan suatu daerah tertentu, target realisasi PAD dan memaksimalkan potensi sangat penting guna mewujudkan tingkat perekonomian yang baik. Kabupaten Pringsewu memiliki pajak daerah dan retribusi daerah sebagai pendapatan asli daerah sehingga dalam pelaksanaannya harus mengoptimalkan sehingga terealisasi dengan maksimal dan menggali potensi dari berbagai sektor ekonomi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pringsewu. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah bahwa pembentukan tinggi rendahnya Kapasitas Fiskal dari realisasi pajak daerah, retribusi daerah dan PDRB, maka dapat disusun suatu kerangka pikir dalam penelitian seperti yang disajikan dalam gambar dibawah ini:

**Gambar 1.1**

### **Kerangka berfikir**



**Keterangan :**

- = Berpengaruh secara parsial  
 ————— = Berpengaruh secara simultan

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Dalam kerangka berfikir diatas penulis menguraikan apakah terdapat hubungan antara variabel X1 (Pajak Daerah), variabel X2 (Retribusi Daerah) dan variabel X3 (Produk Domestik Regional Bruto) terhadap variabel Y (Kapasitas Fiskal) dengan berpegang teguh dan menggunakan dasar hukum yaitu Ekonomi Islam sebagai pedoman bagi penelitian.

**7. Pengajuan Hipotesis**

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.<sup>67</sup> Berdasarkan latar belakang dan landasan teori maka hipotesisnya adalah :

a. **Pengaruh Pajak Daerah terhadap Kapasitas Fiskal Kabupaten Kabupaten Pringsewu**

Penelitian yang dilakukan oleh Lisna lisnawari yang berjudul “Pengaruh Potensi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Kapasitas Fiskal Kabupaten/Kota di Jawa Barat”. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah tidak berpengaruh

---

<sup>67</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 93

terhadap kapasitas fiskal apabila terjadi peningkatan pajak daerah maka kapasitas fiskal akan terjadi penurunan.<sup>68</sup>

Dengan Hasil temuan apabila terdapat kenaikan potensi pajak daerah, kapasitas fiskal akan mengalami penurunan.

Melihat dari penelitian di atas, maka hipotesis pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$H_0$  : Pajak daerah berpengaruh positif terhadap Kapasitas Fiskal

$H_1$  : Pajak Daerah tidak berpengaruh positif Terhadap Kapasitas Fiskal

**b. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Kapasitas Fiskal di Kabupaten Pringsewu**

Penelitian yang dilakukan oleh Atria Tiffany Widyaningsih (2018) dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kapasitas Fiskal Kota Pontianak?”. Dengan Menggunakan data time series. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi. Dengan hasil temuan retribusi daerah memiliki pengaruh negatif terhadap kapasitas fiskal sehingga apabila retribusi daerah bertambah 1 (satu) rupiah mengakibatkan penurunan pada kapasitas fiskal sebesar -28,216.<sup>69</sup> Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Melihat dari penelitian di atas, maka hipotesis kedua yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$H_0$  : Retribusi berpengaruh secara parsial terhadap Kapasitas Fiskal

---

<sup>68</sup> Lisna Lisnawati, “10. Lisna Lisnawati (1249-1262)” 4, no. 2 (2018): 1249–62.

<sup>69</sup> Widyaningsih, “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kapasitas Fiskal Kota Pontianak.”Ibid.

H<sub>1</sub>: Retribusi tidak berpengaruh secara parsial terhadap Kapasitas Fiskal

c. **Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kapasitas Fiskal di Kabupaten Pringsewu**

Penelitian yang dilakukan oleh Kamilaus Konstase Oki (2019) dengan judul “Dampak Otonomi Daerah Terhadap Kapasitas Fiskal Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi NTT”. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis pendekatan kuantitatif deskriptif dengan mengumpulkan data dan informasi, diuji dan dianalisis secara deskriptif. Dengan hasil temuan kenaikan PDRB akan mempengaruhi peningkatan kapasitas fiskal daerah dan juga PDRB memiliki pengaruh positif terhadap kapasitas fiskal daerah. PDRB yang terdiri dari tiga sektor dengan sembilan sub sektor, merupakan modal pembentukan kemampuan atau kapasitas fiskal daerah.<sup>70</sup> Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan mengenai Dampak Otonomi Daerah Terhadap Kapasitas Fiskal Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi NTT maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Melihat dari penelitian di atas, maka hipotesis kedua yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H<sub>0</sub> : Produk Dometik Regional Bruto secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Kapasitas Fiskal

H<sub>1</sub>: Produk Dometik Regional Bruto secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kapasitas Fiskal

---

<sup>70</sup> Kamilaus Konstase Oki, “Dampak Otonomi Daerah Terhadap Kapasitas Fiskal Timor Tengah Utara Provinsi NTT,” *Ekopem: Jurnal Ekonomi Pembangunan* 4, no. 2 (2019): 1, <http://jurnal.unimor.ac.id/JEP/article/view/132>.



## DAFTAR RUJUKAN

- “Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 120/PMK.07/2020,” 2020.
- Ari Nurul Fatimah, Diah Agustina Prihastiwi & Vita Irawati, “*Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Pdrb Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*”. Accounting Global Journal, Vol. 4, No. 2 Oktober 2020.
- Arifin, Zaenal. “Memahami PDRB Sebagai Instrumen Untuk Mengukur Pertumbuhan Ekonomi Di Daerah.” *Https: // Bappeda . Jambi prov . Go . Id*, 2009, 1–3. [https : // bappeda . jambi prov . go .id / welcome / download \\_ file \\_ artikel / Artikel \\_ PDRB . pdf](https://bappeda.jambi.gov.id/welcome/download_file_artikel_Artikel_PDRB.pdf).
- Atria Tiffany widyaningsih, “*Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kapasitas Fiskal Kota Pontianak*”, Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan, Vol. 7, No.3, 2018.
- Ayuwardani, Rizky Primadita, and Isroah Isroah. “Pengaruh Informasi Keuangan Dan Non Keuangan Terhadap Underpricing Harga Saham Pada Perusahaan Yang Melakukan Initial Public Offering (Studi Empiris Perusahaan Go Public Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015).” *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen* 7, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19781>.
- Aziz Abdu, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2008.
- Azwar Saefudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : pustaka pelajar, 2007
- Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, “*Pertumbuhan Ekonomi Lampung Triwulan IV Tahun 2019*”, jadwal rilis 5 Februari 2020
- Bps, Katalog. “Kerjasama : BAPPEDA Kabupaten Kudus Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus Produk Domestik Regional Bruto (

PDRB ),” n.d.

Component, Principal, Regression Pcr, Untuk Mengatasi, Multikolinearitas Pada, Model Regresi, and Linear Berganda. “Perbandingan Metode Partial Least Square (Pls) Dan Principal Component Regression (Pcr) Untuk Mengatasi Multikolinearitas Pada Model Regresi Linear Berganda.” *Unnes Journal of Mathematics* 6, no. 2 (2017): 117–28. <https://doi.org/10.15294/ujm.v6i2.11819>.

Dadang Sufiyanto, “Pasang Surut Otonomi Daerah Di Indonesia”. (Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Jendral Achmad Yani, Bandung, 2020) h.181-10.

Deddy Supriady Bratakusuma dan Dadang Silihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2002.

Deni Herdiyana, “Analisis Data Peta Kapasitas Fiskal Daerah”. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, Vol.1, No.1, 2019.

Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Gramdia, 2007.

Dio Syahrullah, “Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendidikan, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Banten Tahun 2009-2012”. (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014), h, 1112.

Djupiansyah Ganie, “Analisis Pengaruh Upah, Tingkat Pendidikan, Jumlah Penduduk Dan Pdrb Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Berau Kalimantan Timur,” *Jurnal EKSEKUTIF* 14, no. Nomor 2, 2017.

Dr. Tjip Ismail, S.H., M.BA., M.M., “Analisis Dan Evaluasi Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah”, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ri, 2003.

Elvinaro Ardianto, Bambang Q-Aness, 2009. *Filsafat Ilmu Komunikasi*, Bandung : Simbiosis Rekatama Media.

*Fiskal Kabupaten/Kota Di Jawa Barat*". Jurnal Ilmiah Rumpun Ekonomi , ISSN 2086-1613, Vol.8, No.1, 2018.

Habiburrahman, "Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Lampung", Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol.3 No.1 (Oktober 2012), h.106.

Haw. Widjaja, 2002. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Ischak Pandapotan Lumbantobing, "Pengaruh Investasi Dalam Negeri, Investasi Luar Negeri Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Produk Domestik Bruto Di DKI Jakarta," Jurnal Riset Ekonomi Dan Manajemen 17, no. 1, 2017.

Herdiyana, Deni. "Analisis Data Peta Kapasitas Fiskal Daerah." *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara* 1, no. 1 (2019): 112–33.

Ichsan, Nurul. "Tinjauan Penerapan Pungutan Pajak Dan Zakat Menurut Konsep Ekonomi Islam Di Indonesia." *Islamadina* 19, no. No.2 (2018): 75–91.

Jayusman, Iyus, and Oka Agus Kurniawan Shavab. "Aktivitas Belajar Mahasiswa Dengan Menggunakan Media Pembelajaran Learning Management System (Lms) Berbasis Edmodo Dalam Pembelajaran Sejarah." *Jurnal Artefak* 7, no. 1 (2020): 13. <https://doi.org/10.25157/ja.v7i1.3180>.

Kadar Pamuji, "Kebijakan Pengelola Pajak Daerah dalam Kerangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah ( Analisa Terhadap Implementasi Wewenang Pengelolaan Pajak Daerah oleh Pemerintah Pusat dan Pemerinta Daerah)", Fakultas Hukum Universitas Jendral Sudirman Purwokerto, h.15.

Kamba, B, R A M Koleangan, and R L H Tumilaar. "The Effect of Private Investment, Government Expenditure, Labor Force and Regional Original Income on Economic Growth in North Sulawesi Province." *515 Jurnal EMBA* 9, no. 1 (2021): 515–27.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/32314>.

- Khusaini Moh. , *Keuangan Daerah*, Malang : UB Press, 2018.
- Lisna Lisnawati, “*Pengaruh Potensi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Kapasitas Fiskal Di Kabupaten/Kota Di Jawa Barat*”, *Jurnal Akutansi Bisnis Dan Ekonomi*, Volume 4 No. 2, September 2018
- M. Zamhari Ms, “*Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jambi*”, *Jurnal Of Ecomimics and Business*, Vol.1, no.1, (2017)
- Mardiasmo. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi, 2011.
- Mirzaqon, A. T., and B. Purwoko. “Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling Expressive Writing Library.” *Jurnal BK UNESA* 4, no. 1 (2017): 1–8.
- Mohammad Riduansyah, “*Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor*”. *Makara, Sosial Humaniora*, Vol. 7, No. 2, Desember 2003.
- Mona, Margareta, John Kekenusa, and Jantje Prang. “Penggunaan Regresi Linear Berganda Untuk Menganalisis Pendapatan Petani Kelapa. Studi Kasus: Petani Kelapa Di Desa Beo, Kecamatan Beo Kabupaten Talaud.” *D’CARTESIAN* 4, no. 2 (2015): 196. <https://doi.org/10.35799/dc.4.2.2015.9211>.
- Munawir. *Pokok-Pokok Perpajakan*. Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Ninla Elmawati Falabiba. “Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran Di Indonesia Periode 1998 – 2014 Rosalendro” *X*, no. 2 (2019): 177–91.
- Nurdany, Achmad. “Analisis Pengaruh Rasio Keuangan Rentabilitas Terhadap Pendapatan Margin Murabahah Bank Syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank Mega Syariah Periode 2005-2012).” *Khazanah* 5, no. 2 (2013): 13–24. <https://doi.org/10.20885/khazanah.vol5.iss2.art2>.
- Nurjanah, Siti. “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan

Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2005-2017 Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam.” *Economic Journal*, 2018.

Padilah, Tesa Nur, and Riza Ibnu Adam. “Analisis Regresi Linier Berganda Dalam Estimasi Produktivitas Tanaman Padi Di Kabupaten Karawang.” *FIBONACCI: Jurnal Pendidikan Matematika Dan Matematika* 5, no. 2 (2019): 117. <https://doi.org/10.24853/fbc.5.2.117-128>.

Pangestu, SS. “Metode Penelitian.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2017): 1689–99.

Parson Horota, Ida Ayu Purbariani, Robsert M. Marbun,” *Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Melalui Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Jayapura*”, *Jurnal Keuda* Vol.2, no.1, h.33.

Philip Kotler, A.B. Susanto, *Managemen Pemasaran Di Indonesia*, Jakarta : selemba empat, 2001.

Pohan, and Chairil Anwar. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.

Robert A. Simanjuntak, “Kebutuhan Fiskal, Kapasitas Fiskal dan Optimalisasi Potensi PAD”, ( Jakarta:LPEM, 2005).

Rosdiyati, R, I Kurniyawati, and L N Anikah. “PKM: Seminar Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Untuk Menentukan Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur.”... *Kepada Masyarakat (PkM)* 3, no. 1 (2020): 67–70. <http://iocscience.org/ejournal/index.php/abdimas/article/view/689>.

Rosdiyati, R, I Kurniyawati, and L N Anikah. “PKM: Seminar Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Untuk Menentukan Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur.” ... *Kepada Masyarakat (PkM)* 3, no. 1 (2020): 67–70. <http://iocscience.org/ejournal/index.php/abdimas/article/view/689>.

- Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Sahidin. "Metode Penelitian Bab III." *Biomass Chem Eng* 49, no. 23–6 (2015): 40–68.
- Sarwono, J. "Memadu Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif: Mungkinkah?" *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Ukrida* 9, no. 2 (2009): 98208.
- Selatan, Walikota Tangerang. "Walikota Tangerang Selatan," 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sugiyono, *Metode penelitian Managemesn*, Yogyakarta : Alfabeta, 2013. Arifin, Zaenal. "Memahami PDRB Sebagai Instrumen Untuk Mengukur Pertumbuhan Ekonomi Di Daerah." <https://Bappeda.Jambiprov.Go.Id>, 2009, 1–3. [https://bappeda.jambiprov.go.id/welcome/download\\_file\\_artikel/Artikel\\_PDRB.pdf](https://bappeda.jambiprov.go.id/welcome/download_file_artikel/Artikel_PDRB.pdf).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta, 2018.
- Surahman, Maman, and Fadilah Ilahi. "Konsep Pajak Dalam Hukum Islam." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2017): 166–77. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2538>.
- Suryana, *Perekonomian Pembangunan Problematika dan Pendekatan*, Jakarta : Selemba Empat, 2000.
- Terhadap, Kompetensi, Kinerja Manajerial, Rumah Sakit, Swasta Di, and Kota Pekanbaru. "198615 – Pengaruh – Komitmen – Organisasional - Motivasi," 2017, 338–52.
- Trisni suryarini, Tarsis Tarmudji, *Pajak di Indonesia*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012.
- Ufira Isbah dan Rita Yani Iyan, "Analisis Peran Sektor Pertanian Dalam Perekonomian dan Kesempatan Kerja Di Provinsi Riau", *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, Tahun VII, No.19, (November 2016), h. 49-50. Arifin, Zaenal. "Memahami PDRB Sebagai Instrumen Untuk Mengukur Pertumbuhan

Ekonomi Di Daerah.” <https://Bappeda.Jambiprov.Go.Id>, 2009, 1–3.

[https://bappeda.jambiprov.go.id/welcome/download\\_file\\_artikel/Artikel\\_PDRB.pdf](https://bappeda.jambiprov.go.id/welcome/download_file_artikel/Artikel_PDRB.pdf).

Waris, Irwan. “Pergeseran Paradigma Sentralisasi Ke Desentralisasi Dalam Mewujudkan Good Governance.” *Jurnal Kebijakan Publik* 3, no. 1 (2012): 38–47.

<https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JKP/article/view/884/877>.

Widyaningsih, Atria Tiffany. “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kapasitas Fiskal Kota Pontianak.” *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan* 7, no. 3 (2018): 215. <https://doi.org/10.26418/jebik.v7i3.25893>.



